

**SIARAN PERS****Otorita Ibu Kota Nusantara**

305/sipers/sdmhumas-oikn/09/2024

9 September 2024

**Komisi II DPR RI Setujui Usulan Tambahan Anggaran Otorita IKN TA 2025**

**JAKARTA** - Komisi II DPR RI setuju usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp. 27.814.516.000.000 atau sekitar Rp 27,8 triliun. Persetujuan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (09/09/2024).

Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni menjelaskan, berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas pada tanggal 5 April 2024, anggaran Otorita IKN sebesar Rp. 505,5 miliar. Kemudian berdasarkan Pagu Indikatif ini, dilakukan pertemuan tiga pihak dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk menyusun rencana kerja 2025.

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran tahun 2024, pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 10 Juni 2024, semula diusulkan tambahan anggaran sebesar Rp. 29,8 triliun. Usulan ini telah dicatat dan mendapat persetujuan Komisi II DPR RI namun usulan tersebut tidak tertampung pada Alokasi Anggaran Otorita IKN Tahun Anggaran (TA) 2025 yang ditetapkan pada tanggal 19 Juli 2024. Besaran Pagu Anggaran Otorita IKN 2025 tidak mengalami perubahan dibandingkan Pagu Indikatif, yaitu tetap sebesar Rp. 505,5 miliar.

Pada tanggal 5 Agustus 2025, Otorita IKN melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan anggaran dengan Kementerian PUPR untuk memastikan bahwa tidak ada kegiatan pembangunan yang tumpang tindih antara Otorita IKN dan Kementerian PUPR. Sehingga setelah dilakukan penajaman usulan tambahan anggaran menjadi sebesar Rp. 27,8 triliun dan kemudian mengajukan kembali revisi usulan tambahan anggaran tersebut kepada Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas.

“Usulan ini kemudian kami sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada tanggal 2 September 2024 yang lalu, dan telah diterima dan disetujui oleh Anggota Komisi II DPR RI,” terang Plt. Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni.

Ia menjelaskan, total usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar Rp 27,8 triliun merupakan usulan dari 6 ke deputian. Ke deputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan sebesar Rp788,5 miliar, Ke deputian Bidang Pengendalian Pembangunan sebesar Rp106,1 miliar, Ke deputian Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp62,5 miliar, Ke deputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital sebesar Rp37,7 miliar, Ke deputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar, dan terakhir usulan yang paling besar dari Ke deputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp26,7 triliun.

“Sehingga secara total kebutuhan anggaran OIKN Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 28,3 triliun,” ungkap Raja Juli Antoni.

Terkait besarnya penambahan usulan kebutuhan anggaran tersebut, Plt. Wakil Kepala Otorita IKN menjelaskan, “Secara spesifik saya akan menyampaikan tentang usulan anggaran dari Ke deputian Sarana dan Prasarana, ini yang paling signifikan, sebesar Rp. 26,7 triliun akan digunakan untuk melengkapi ekosistem terbangun tahun 2024-2025. Kegiatan yang diusulkan antara lain pembangunan jalan dan MUT di KIPP, Hunian ASN, Infrastruktur dasar lainnya seperti air minum, persampahan dan limbah, gedung kantor Otorita IKN serta lain sebagainya.”



Selain itu usulan tambahan akan digunakan untuk pengelolaan gedung, kawasan, serta pengelolaan sarana dan prasarana dasar yang sudah terbangun seperti Hunian Pekerja Konstruksi, Hunian ASN, Rusun MBR rumah tapak jabatan menteri dan sebagainya.

Dalam kesempatan tersebut, Plt. Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni juga menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak, "Ijinkan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak terutama kepada PUPR yang telah bekerja tanpa lelah, Bapak/Ibu dari ATR BPN dan KLHK yang telah menyediakan lahan serta K/L lain sebagainya, wabil khusus kepada bapak ibu pimpinan Komisi II DPR RI yang terus memberikan dukungan politik dan politik anggaran kepada OIKN," ungkap Raja Juli Antoni.

Raja Juli Antoni berharap, dengan disetujuinya usulan tambahan anggaran untuk 2025 ini, Otorita IKN dapat mengelolanya secara akuntabel. "Mudah-mudahan kita bisa mengelola secara akuntabel, transparan, dan kembali mendapatkan WTP dari BPK pada tahun depan," ujarnya.

---

## HUMAS OTORITA IBU KOTA NUSANTARA

### Kontak:

halo@ikn.go.id / [humas@ikn.go.id](mailto:humas@ikn.go.id)

Website : [ikn.go.id](http://ikn.go.id)  
Instagram : [instagram.com/ikn\\_id](https://www.instagram.com/ikn_id)  
Facebook : [facebook.com/iknindonesia1](https://www.facebook.com/iknindonesia1)  
Twitter : [twitter.com/ikn\\_id](https://twitter.com/ikn_id)  
Youtube : IKN Indonesia

#KotaDuniauntukSemua  
#Nusantara  
#IbuKotaNegara

---

Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. Nusantara akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara. Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ialah otoritas yang mengelola dan mengatur Nusantara. Otorita IKN merupakan lembaga setingkat kementerian yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia, bekerja langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Otorita IKN bertugas sebagai pendukung persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara ke Nusantara.

---

**DOKUMENTASI FOTO**  
**Sumber: Humas Otorita Ibu Kota Nusantara**





NUSANTARA

# SIARAN PERS



©2024 Humas Otorita IKN



©2024 Humas Otorita IKN